



Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum Zaman Jepang

Eka Firmansyah^{1*}, Syamsul Arifin², M. Nurul Humaidi³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

E-mail: ekafirmansyah689@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-10-12 Revised: 2023-11-23 Published: 2023-12-02	<p>This research aims to examine Islamic religious education policies in Japanese public schools. This research uses literature study. In this research, the researcher collected good literature from experts related to the issues discussed in this article, then the researcher prepared an article based on information obtained in previous literature. In this research, it was found that not much of the purpose of education in the Japanese colonial era could be explained, because students were only busy with war so there was very little attention to education. Furthermore, the Japanese colonialists adopted a policy that Dutch was completely prohibited from being used in both offices and schools. Meanwhile, Japanese is a second language. During the Japanese occupation, Indonesian developed and modernized so that it became a lingua franca and a scientific language. During this period, nationalism grew to perfection, rural communities and small communities who from the start did not receive western Dutch education, had the opportunity to improve themselves in their ability to use the Indonesian language.</p>
Keywords: <i>Education Policy;</i> <i>Public School;</i> <i>Japanese Period.</i>	
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-10-12 Direvisi: 2023-11-23 Dipublikasi: 2023-12-02	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seputar kebijakan pendidikan agama Islam di sekolah umum zaman jepang. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan literatur-literatur yang baik dari para pakar terkait dengan persoalan yang dibahas dalam artikel ini, kemudian peneliti Menyusun artikel berdasarkan informasi yang didapatkan dalam literatur-literatur terdahulu. Pada penelitian ini ditemukan bahwasanya, Tujuan pendidikan di zaman penjajahan Jepang tidaklah banyak yang dapat diuraikan, sebab murid hanya disibukkan dengan peperangan sehingga perhatian dalam pendidikan sangat sedikit. Selanjutnya penjajah Jepang mengambil kebijakan bahwa bahasa Belanda dilarang digunakan sama sekali baik di kantor-kantor maupun di sekolah- sekolah. Sedangkan bahasa Jepang menjadi bahasa kedua. Selama masa pendudukan Jepang inilah bahasa Indonesia berkembang dan dimodernkan sehingga menjadi bahasa pergaulan dan bahasa ilmiah. Pada masaa ini nasionalisme tumbuh dengan sempurna, masyarakat pedesaan dan masyarakat kecil yang sejak awal tidak mendapatkan pendidikan barat Belanda, memiliki peluang untuk meningkatkan diri dalam kemampuan penggunaan bahasa Indonesia.</p>
Kata kunci: <i>Kebijakan Pendidikan;</i> <i>Sekolah Umum;</i> <i>Zaman Jepang.</i>	

I. PENDAHULUAN

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan agama Islam dan sudah ada sejak lama di Indonesia. Lembaga pendidikan ini berperan sebagai organisasi yang mengelola sistem pendidikan berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang mengacu pada Al-Qur'an dan hadits sebagai pedoman utama. Tujuan utama dari lembaga pendidikan ini adalah untuk menyampaikan nilai-nilai Islam kepada para siswanya. Makna dari istilah "pesantren" didasarkan pada awalan "pe" dan akhiran "an". Menurut Geertz, kata "pesantren" berasal dari kata "Shantri" yang merujuk kepada cendekiawan Hindu yang mahir dalam menulis. Oleh karena itu, "pesantren" dapat diartikan sebagai nilai dari seorang ulama suci yang terlatih dan memiliki moral yang tinggi

(Tobroni, 2022). Islam bukan hanya sekadar agama, melainkan juga sebuah peradaban yang menarik untuk dianalisis dari sudut pandang perspektif global (Firmansyah, 2023).

Kontribusi umat Islam terhadap sejarah Indonesia, khususnya perjuangan melawan kolonialisme, tidak dapat dipisahkan dari kisah pembangunan bangsa. Karena umat Islam merupakan mayoritas penduduk, mereka mempunyai kewajiban moral untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pemerintahan bangsa. Para pemimpin Islam telah membangun landasan yang kokoh bagi pendidikan Islam di bidang pendidikan karena pemerintah kolonial tidak mengakomodirnya dengan baik sepanjang masa kolonial. Khususnya di lembaga-lembaga yang didirikan oleh pemerintah kolonial,

pendidikan Islam bukanlah topik utama. Akibatnya, para pemimpin Islam mendirikan sekolah mereka sendiri untuk memberikan tempat belajar dan pendidikan Islam bagi umat Islam (Nasution, 1992). Pendidikan terjadi setiap hari, baik di rumah maupun melalui pertemuan apa pun yang mempunyai efek formatif pada pikiran, perasaan, atau tindakan seseorang. Pendidikan dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja (Firmansyah, dkk, 2023).

Indonesia mempunyai sistem pendidikan formal yang dikenal dengan sistem pendidikan Islam sebelum Belanda datang dan membawa sistem sekolah kontemporer yang sebanding dengan yang muncul di Barat. Satu-satunya sistem pendidikan formal yang ada pada saat itu adalah sistem pendidikan Islam, dan mempunyai struktur organisasi dan manajemen yang berbeda dari sistem yang kemudian diperkenalkan oleh Belanda (Yunus, 1985). Masa *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) dan masa Hindia Belanda (*Nederlands-Indi*) merupakan dua masa utama pendidikan kolonial Belanda di Indonesia. Pendidikan Indonesia pada masa VOC didasarkan pada konsep komersial, dengan penekanan khusus pada pertimbangan untung dan rugi dalam batasan hukum ekonomi. VOC, sebuah perusahaan komersial Belanda, tidak takut menggunakan kekerasan, jika perlu, untuk mencapai tujuannya. Hal ini tercermin dalam haknya yang tertuang dalam klausul yang berbunyi: "Organisasi ini harus berdagang dengan Indonesia dan bila perlu boleh menggunakan kekuatan bersenjata. Selain itu, harus membangun sekolah-sekolah untuk memajukan agama Kristen" (Subhan, 2012).

Dasar masuknya Jepang ke Indonesia berbeda dengan dasar Belanda. Jepang datang ke Indonesia dengan tujuan politik dan militer yang sejalan dengan agenda imperialisme global yang diterima secara umum, sedangkan Belanda pada mulanya datang untuk tujuan perdagangan. Niat kedua penjajah datang ke Indonesia berpengaruh besar terhadap kebijakan yang mereka ambil (Firmansyah, 2022). Berbeda dengan sekolah negeri yang sebagian besar ditutup oleh pemerintah Jepang, madrasah pada masa penjajahan Jepang justru berkembang pesat dengan memanfaatkan posisi beruntungnya. Mahmud Yunus yang mencatat bahwa dibandingkan pada masa penjajahan Belanda, pendidikan Islam mengalami kemajuan yang lebih bermanfaat pada masa penjajahan Jepang, memperhatikan kejadian tersebut. Pendidikan santri mengalami perubahan yang sangat besar

bahkan dengan berdirinya Hizbullah pada saat itu, termasuk penyediaan pelatihan militer khusus untuk membekali mereka dalam rangka perjuangan jihad (Firmansyah, 2022).

Dengan demikian, menarik peneliti untuk meneliti dengan judul "kebijakan pendidikan Islam di sekolah umum zaman Jepang".

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan kaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan literatur-literatur yang baik dari para pakar terkait dengan persoalan yang dibahas dalam artikel ini, kemudian peneliti Menyusun artikel berdasarkan informasi yang didapatkan dalam literatur-literatur terdahulu.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Penjajahan Jepang

Ketika perang pecah di dunia, Jepang dengan cepat menjadi kekuatan yang mendominasi di Asia dan mengambil peran utama dalam pertempuran tersebut. Ketika Jepang mampu mengalahkan Rusia dalam pertempuran, itu merupakan salah satu kemenangan besar mereka. Jepang bercita-cita menjadi negara dominan di Asia Timur Raya. Melalui pertempuran yang berlarut-larut, Jepang akhirnya menaklukkan Indonesia dan mengakhiri kolonialisme Belanda yang sudah berlangsung lama. Indonesia berada di bawah pendudukan Jepang, dan perubahan signifikan dilakukan pada sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang diatur oleh pemerintah Jepang mengambil peran sekolah-sekolah yang pernah berada di bawah pemerintahan Belanda. Hampir setiap hari dalam jangka waktu ini dikhususkan untuk pelatihan militer atau pekerjaan, dan aktivitas pendidikan apa pun yang dilakukan sering kali berkaitan dengan perang. Sekitar waktu ini, kegiatan yang berhubungan dengan sekolah meliputi (Rifa'i, 2011):

1. Mengumpulkan batu dan pasir untuk kepentingan perang.
2. Membersihkan bengkel-bengkel dan asrama militer.

3. Menanam ubi-ubian dan sayur-sayuran di pekarangan sekolah untuk persediaan bahan makanan.
4. Setiap pagi wajib mengucapkan sumpah setia kepada kaisar Jepang, lalu dilatih kemiliteran.
5. Menanam pohon jarak untuk bahan pelumas.

Kehadiran Jepang di Indonesia memang bisa menumbuhkan rasa "keberanian" di kalangan masyarakat. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa semua tindakan ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan Jepang. Masuknya Jepang ke Indonesia dalam konteks sosiopolitik dimaknai sebagai upaya memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Indonesia. Sistem kerja paksa "*romusa*" digunakan oleh Jepang untuk menindas penduduk asli ketika mereka berkuasa. Pendidikan pada masa penjajahan Jepang dimanfaatkan untuk menghasilkan pejuang-pejuang yang mampu mendukung perang demi kepentingan Jepang dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja bebas (*romusha*). Oleh karena itu, untuk melayani kepentingan Jepang, pelajar diharapkan mengikuti pelatihan fisik, pelatihan militer, dan indoktrinasi (Setiyadi, 1979a).

Karena hampir semua siswa terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan perang pada masa penjajahan Jepang, pendidikan mempunyai arti yang sangat terbatas pada masa itu. Gagasan *hakko ichiu*, atau "kakak laki-laki" yang datang ke Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan bersama dalam kerangka Asia Timur Raya, dimanfaatkan Jepang untuk mencoba memenangkan hati masyarakat Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, gagasan ini menjadi landasan pendidikan (Setiyadi, 1979). Mereka memberlakukan strategi yang melarang penggunaan bahasa Belanda secara ekstensif di gedung-gedung pemerintah dan lembaga pendidikan sepanjang masa penjajahan Jepang. Bahasa Jepang malah tersedia sebagai bahasa kedua. Bahasa Indonesia mengalami modernisasi dan perkembangan besar pada masa pendudukan Jepang, sehingga menjadi *lingua franca* dan bahasa ilmiah yang penting.

Nasionalisme juga mengalami peningkatan pesat pada masa ini. Pemerintah Belanda memberikan akses terhadap pendidikan Barat kepada masyarakat dan kelompok pedesaan, memberikan mereka kesempatan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia

mereka. Mereka bersemangat sekali mempelajari bahasa Indonesia yang diwajibkan mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Hal ini mendorong semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi yang sangat penting bagi pengembangan jati diri bangsa (Salim, 2007).

Mengenai diferensiasi pendidikan, pemerintah kolonial Belanda dan Jepang menggunakan strategi yang berbeda. Meskipun Jepang mengadopsi pendekatan pendidikan yang seragam bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang latar belakang sosial atau kelas mereka, Belanda menerapkan kebijakan yang membedakan antara kelas atas (seperti bangsawan) dan kelas bawah (rakyat jelata) dengan mengizinkan kelas atas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan. Jepang mengadopsi kebijakan "homogenitas sekolah", yang memungkinkan orang-orang dari semua kelas sosial, termasuk bangsawan dan rakyat jelata, untuk bersekolah di lembaga pendidikan yang sama. Hal ini sangat kontras dengan politik kolonial Belanda yang sering menimbulkan perpecahan sosial (*divide et empera*). Di bawah pemerintahan Jepang, pendekatan yang lebih inklusif diterapkan, di mana semua organisasi, baik nasionalis maupun religius, yang sebelumnya berkembang secara terpisah pada masa kolonial Belanda, digabungkan dalam satu wadah, seperti *Masyumi*, sebagai bagian dari politik integrasi yang diterapkan oleh pemerintah Jepang (Rahman, 2018).

Selama masa pendudukan Jepang, terjadi berbagai perubahan signifikan dalam sistem pendidikan. Ini disebabkan oleh penghapusan sistem penggolongan, baik berdasarkan asal usul etnis maupun status sosial. Beberapa perubahan mendasar ini mencakup (Rahman, 2018):

1. Tidak ada pembedaan status sosial pada tingkat sekolah dasar yang sering disebut dengan Sekolah Rakyat (Kekumin Gakko). Kurikulum sekolah dasar dirancang untuk diselesaikan dalam enam tahun. Sekolah SD, Kelas Satu, Kelas Dua, HIS, dan ELS yang ada telah digantikan oleh sekolah-sekolah tersebut, yang tersebar di seluruh kota (Rahman, 2018).
2. Semua kategori masyarakat yang telah memiliki ijazah SR berhak untuk bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (Shoto Chu Gakko), yang sebanding dengan

sekolah menengah pertama yang ada. Selain itu terdapat sekolah kejuruan antara lain Sekolah Pelayaran, Sekolah Pertanian, dan Sekolah Pertukangan (Kogyo Gakko). Tingkat sekolah ini berlangsung selama tiga tahun (Rahman, 2018).

3. Jenjang sekolah lanjutan umum tingkat atas (*Kota Chu Gakko*). Lama pendidikannya 3 tahun.
4. Hampir seluruh sekolah menengah atas di tingkat menengah ditutup. Sekolah Tinggi Kedokteran (*Ika Dai Gakko*), Sekolah Farmasi (*Yaku Gakko*), Sekolah Kedokteran Gigi (*Sika Gakko*), Sekolah Tinggi Teknik (*Kogyo Dai Gakko*) yang didirikan pada tahun 1944 di Bandung, Sekolah Tinggi Kedokteran Hewan di Bogor, dan Akademi Pemerintahan (*Kenkoku Gakko In*) yang dibuka pada awal tahun 1945 di Jakarta sebagai pengganti MOSVIA pada masa penjajahan Belanda, termasuk di antara sekolah-sekolah yang masih berdiri (Rahman, 2018).

Meskipun kebijakan pada pendidikan pemerintah Jepang menekankan konsistensi di sekolah, ada juga kelemahannya, terutama karena jumlah sekolah saat ini jauh lebih sedikit dibandingkan pada masa kolonial Belanda. Sekolah menengah berkurang dari 850 menjadi hanya 20, sementara jumlah sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500. Selain itu, terdapat sekitar 30% lebih sedikit siswa di sekolah dasar dan 90% lebih sedikit siswa di sekolah menengah atas. Selain itu, jumlah guru sekolah dasar berkurang sekitar 35% dan jumlah guru sekolah menengah berkurang 95% (Setiyadi, 1979). Penyebabnya antara lain adalah beban kerja yang sangat berat bagi para guru.

Perubahan signifikan terjadi pada konten pendidikan selama pendudukan Jepang. Tujuan utama dari bahan ajar yang digunakan selama ini adalah untuk mendukung tujuan perang Jepang. Tugas pengabdian masyarakat seperti merapikan kamar asrama, membersihkan bengkel, ataupun mengumpulkan perbekalan untuk pertahanan sering kali dilimpahkan kepada siswa. Selain itu, pendidikan di sekolah juga memerlukan indoktrinasi intelektual dan mental yang menekankan gagasan *hakko ichiu*, atau "kemakmuran bersama Jepang di Asia Raya", atau variasinya. Pelatihan militer lebih lanjut, paparan budaya Jepang, partisipasi dalam

olahraga, dan menyanyikan lagu-lagu Jepang juga merupakan bagian dari hal ini (Rahman, 2018). Jika informasi pendidikan yang diberikan di atas dipahami, dapat dilihat bahwa Jepang pertama kali menghadapi tantangan komunikasi, terutama karena larangan penggunaan bahasa Belanda dan bahasa lain selain bahasa Jepang dan Indonesia, yang sebelumnya digunakan. Namun, Jepang mengatasi tantangan ini dengan mencoba melakukan nipponisasi bahasa tersebut, yang mencakup penggabungan aspek bahasa Jepang ke dalam bahasa Indonesia, serta dengan memperkuat kader tenaga pengajar untuk menyampaikan bahasa tersebut (Rahman, 2018).

Jika informasi pendidikan yang diberikan di atas dipahami, dapat dilihat bahwa Jepang pertama kali menghadapi tantangan komunikasi, terutama karena larangan penggunaan bahasa Belanda dan bahasa lain selain bahasa Jepang dan Indonesia, yang sebelumnya digunakan. Namun, Jepang juga mengatasi tantangan ini dengan mencoba melakukan nipponisasi bahasa tersebut, yang mencakup penggabungan aspek bahasa Jepang ke dalam bahasa Indonesia, serta dengan memperkuat kader tenaga pengajar untuk menyampaikan bahasa tersebut (Rahman, 2018). Selain jenjang pendidikan yang telah dijelaskan sebelumnya, pendidikan madrasah yang disebut juga Madrasah Awaliyah juga dilakukan pada masa penjajahan Jepang. Di madrasah ini, ratusan anak laki-laki dan perempuan mengikuti kelas pada sore hari. Kelas di Madrasah Awaliyah memakan waktu sekitar satu setengah jam, dan siswa termuda di sana berusia sekitar 7 tahun. Anak-anak mengikuti pelajaran agama yang mencakup berbagai topik pada sesi pagi di Sekolah Rakyat (SR), antara lain membaca Alquran, ibadah, akhlak, dan keimanan. Tanggung jawab Dewan Agung Islam adalah mengawasi Madrasah Awaliyah (Yunus, 1995).

Otoritas pendudukan Jepang memperkenalkan beberapa bentuk pendidikan guru untuk mengatasi kekurangan guru. Berbeda dengan pemerintahan kolonial Belanda, pendidikan guru ini tidak mengambil sikap dualistik. Tiga jenis lembaga pelatihan guru yang berbeda baru-baru ini dibuka, termasuk:

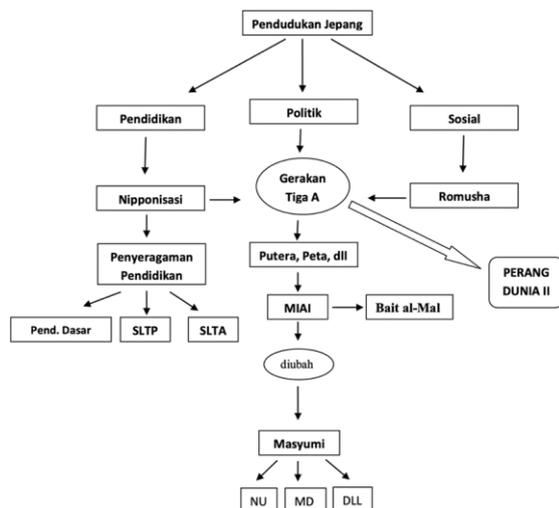
1. Sekolah Guru (SG) selama 2 tahun, yang disebut *Sjootoo Sihan Gakko*.
2. Sekolah Guru Menengah (SGM) selama 4 tahun, yang disebut *Guutoo Sihan Gakko*.

3. Sekolah Guru Tinggi (SGT) selama 6 tahun, yang disebut *Kootoo Sihan Gakoo* (Makmur, 1993).

Tabel 1. Rasio jumlah sekolah era Penjajahan Jepang dan Belanda

No	Jenjang Pendidikan	Belanda	Jepang
1	Sekolah Dasar (SR)	21.500	13.500
2	Sekolah Lanjutan	850	20

Terdapat disparitas yang mencolok antara sistem pendidikan pada masa penjajahan Jepang dan pemerintahan kolonial Belanda dalam pembahasan pendidikan Islam pada masa itu. Dalam konteks kemajuan pendidikan Indonesia selama ini, perbedaan-perbedaan tersebut mempunyai dampak menguntungkan dan merugikan yang harus diperhatikan. Memahami sejarah pendidikan Indonesia dan dampaknya terhadap evolusi masyarakat dan budaya Indonesia sangatlah penting.



Gambar 1. Bagan Pendidikan Era Penjajahan Jepang

B. Pengaruh Kolonialisme Jepang terhadap Pendidikan Islam

Sekolah negeri dan sekolah agama merupakan mayoritas sistem pendidikan di Indonesia sebelum kedatangan Jepang dan selama era kolonial Belanda. Model pendidikan sistem pendidikan Belanda sering digunakan di sekolah umum. Di sisi lain, pendidikan agama merupakan model dan wujud yang berakar pada warisan ulama Islam. Selama ini, diskriminasi berdasarkan etnis juga terjadi dalam pengelolaan sekolah, dimana pribumi (*Boemiputra*), Tionghoa, Arab, Hindia Belanda, dan bangsawan semuanya menghadapi

prasangka. Menggunakan model pendidikan Belanda sebagai inspirasi (Jalaluddin, 1995).

Beberapa madrasah dan sekolah ditutup ketika Jepang menyerbu. Bahkan ada yang ditutup oleh para pendiri dan gurunya. Hal ini dilakukan karena rasa takut dan menghindari keharusan melakukan perjalanan ke Tokyo setiap pagi untuk mengikuti upacara Saekere, yang dilakukan sebagai tanda penghormatan kepada Kaisar Tenno Haika. Prosedur ini dipandang sebagai teknik mengelak dan bertentangan dengan ajaran Islam (Effendy, 2002). Mayoritas perguruan tinggi dan universitas menghentikan pengajaran ketika pendudukan dimulai. Jika masih ada madrasah atau pesantren yang beroperasi, mungkin karena lolos dari kendali intelijen Jepang. Atau seperti yang ditemukan oleh Madrasah Ahliyah 26 Iilir, hal ini bisa berarti mengabaikan isu-isu nasional karena lebih menekankan pada komponen pedagogi kehidupan sufi. Akibatnya, meski jumlah muridnya lebih sedikit, madrasah tersebut tetap dapat berfungsi hingga akhir tahun 1944 (Saefudin, 2020). Model pendidikan Islam berubah menjadi halaka setelah sekolah dan madrasah ditutup, di mana siswa diajar oleh banyak guru, yang masing-masing memiliki pengetahuan khusus dalam mata pelajaran yang diajarkan. Seringkali rumah guru menjadi lokasi proses pendidikan ini (Effendy, 2002).

Setelah menyelesaikan pendidikan awal, seperti membaca buku atau mendapatkan gelar akademis, banyak orang ingin menyelesaikan studi tinggi di Mesir atau Mekah, Arab Saudi. Namun kekhawatirannya disebabkan oleh kemungkinan ditahan dan dipaksa bergabung dengan BPP. Para pemuda ini ditahan di fasilitas ini di mana mereka harus menjadi pekerja pertahanan militer Jepang dan sering kali tidak mendapatkan makanan (Saefudin, 2020). Tentunya proses mempelajari pola Halaqah tidak memakan banyak waktu. Pasalnya, seperti telah dijelaskan sebelumnya, militer Jepang melakukan kesalahan dalam strategi dan taktiknya untuk merebut hati rakyat Indonesia (Saefudin, 2020). Oleh karena itu, menurut Oendang-Oendeng tanggal 22 April 1942 Nomor 12, sekolah-sekolah sebelumnya telah ditutup dan dibuka kembali secara bertahap. Sekolah negeri pertama yang dibuka adalah HIS Djagamonjet, HIS Gastenweg, dan HIS Baloelweg di Jatinegara pada tanggal 1 Juni 1942. Jumlah siswanya sebanyak 966 orang.

Hal ini menunjukkan besarnya minat masyarakat Indonesia terhadap pendidikan dan pembelajaran (Saefudin, 2020).

Pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 hingga 1945, meskipun singkat, mempunyai dampak yang besar terhadap pendidikan Indonesia. Jepang segera menghapus sistem sekolah peninggalan Belanda, yang mengklasifikasikan siswa berdasarkan ras, kebangsaan, dan status sosial, setelah mengambil alih kekuasaan. Sekolah negeri (SR), sering disebut kocamin gagko dalam bahasa Jepang, merupakan tingkat pendidikan terendah. Semua lapisan masyarakat dipersilakan untuk menghadiri lembaga ini, tanpa memandang status sosial atau etnis (Saefudin, 2020). Pada bulan Agustus 1942, sejumlah sekolah menengah juga dibuka kembali. SMP I di Prapatan 10, SMP II di Gambir Wetan, dan SMP III di Raya Straat Manggarai adalah beberapa contohnya. Selain itu juga didirikan Sekolah Menengah Pertama (SMT) Kabupaten Menteng yang sekarang dikenal dengan SMA (Hasbullah, 2001, Notosusanto, 1993).

Belakangan, ketiga jenjang pendidikan tersebut sekolah dasar selama enam tahun, sekolah menengah pertama selama tiga tahun, dan sekolah menengah atas selama tiga tahun menjadi landasan sistem pendidikan bangsa. Selain itu, sistem pendidikan yang dikotomis dan diatur telah dihilangkan karena tidak lagi membedakan masyarakat adat dengan kelompok lain. Selain itu, sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda sebelumnya, sekolah swasta, dan lembaga keagamaan Islam termasuk sekolah Muhammadiyah, sekolah Taman Siswa, dan sekolah yang dikelola oleh para misionaris juga dapat dibuka kembali untuk kepentingan lingkungan sekitar (Saefudin, 2020).

Seperti telah disebutkan sebelumnya, sistem pendidikan pada masa pemerintahan Jepang memiliki sejumlah keunikan. Beberapa sekolah swasta, seperti Muhammadiyah dan Taman Siswa, antara lain, diizinkan untuk terus berkembang di bawah pengawasan dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintahan pendudukan Jepang sementara sekolah-sekolah tersebut disatukan dan disosialisasikan. Madrasah, sebaliknya, terus aktif didirikan selama masa pemerintahan Jepang. Terlepas dari motivasi politik atas tindakan ini, umat Islam Indonesia memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Hal ini terlihat

pada pembangunan Madrasah Awaliyah yang terinspirasi dari Dewan Islam Tertinggi di Sumatera (Saefudin, 2020).

Sementara itu, pemerintah Jepang menyetujui pembukaan Institut Pendidikan Tinggi Islam (STI) di Jakarta yang dipimpin oleh tokoh seperti KH. Wahid Hasyim, Kahar Muzakar, dan Bung Hatta (Zuhairini, 1995). Perguruan tinggi di Indonesia mengalami kerugian akademis di bawah pendudukan Jepang. Namun, Indonesia mendapat kepuasan khusus dengan terus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pada masa ini para guru didorong untuk mengadopsi pandangan nasionalis, dan para pejabat muda yang berpikiran independen dilatih. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran di semua tingkatan, meskipun bahasa Jepang juga diajarkan sebagai bagian dari kurikulum (Zuhairini, 1995).

Organisasi pemuda mahasiswa ini bertanggung jawab untuk mendidik para pemuda dalam pelatihan paramiliter, termasuk pawai dan latihan tempur yang terinspirasi oleh tentara Jepang. Pada tanggal 15 Oktober 1943, Jepang mendirikan Jawa Ei Giyagen Kambo Renseitai, yang berkantor pusat di Bogor, untuk melaksanakan operasi tersebut (Tilaar, 1995). Individu yang menyelesaikan studi dan pelatihannya di sini akan bergabung dengan Organisasi Perlindungan Dalam Negeri (PETA). Beberapa pemuda Indonesia, khususnya dari Jawa dan Sumatera, tergabung dalam kelompok yang kelak menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI) modern (Leirissa, 1985).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia dari waktu ke waktu telah menunjukkan bahwa sejak bangkitnya Islam, umat Islam kini sangat mementingkan pendidikan. Terlepas dari pentingnya pendidikan Islam, umat Islam Indonesia didorong untuk mematuhi ajaran Islam meskipun dengan cara yang minimal melalui upaya mengislamkan masyarakat. Sistem Halaka yang sering digunakan di masjid, rumah ibadah, bahkan kediaman ulama dalam menjalankan pengajaran. Selain itu, banyak masyarakat yang meyakini bahwa pendidikan masa kini merupakan evolusi dari pendidikan terdahulu

karena pendidikan Islam telah mengalami modifikasi dan juga perkembangan seiring berjalannya waktu.

Pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang erat kaitannya dengan saling ketergantungan antara umat Islam di Jepang dan Indonesia. Jepang membutuhkan dukungan umat Islam Indonesia untuk menerima bantuan umat Islam Indonesia dalam konteks Perang Besar Asia Timur (Daulay, 2009). Sementara itu, umat Islam Indonesia berharap kemerdekaan bagi Indonesia dapat dicapai melalui kerja sama dengan Jepang. Dalam pidatonya di Kleriker, Letnan Jenderal Imamura, perwakilan militer Jepang di Pulau Jawa, mengatakan bahwa tujuan Jepang adalah untuk melindungi dan menghormati Islam.

Keadaan umum pendidikan Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan Jepang. Meskipun pengawasan terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam di masyarakat merupakan tujuan pengaturan pendidikan agama pada masa pendudukan Jepang, namun Jepang tampaknya mempunyai kebijakan yang sedikit lebih lunak dibandingkan pemerintah kolonial Belanda. Hal ini mungkin disebabkan oleh kedatangan Jepang baru-baru ini di Indonesia dan kebutuhannya akan dukungan Muslim. Jepang bahkan memberikan bantuan keuangan kepada madrasah, sehingga masyarakat dapat mendirikan kembali madrasah yang sebelumnya diperintahkan ditutup oleh pemerintah kolonial Belanda.

Awalnya, Jepang mendukung umat Islam di Indonesia untuk mengembangkan pendidikan Islam, khususnya menyebarkan ajaran Islam. Ini adalah bagian dari strategi Jepang dalam konteks Perang Dunia II. Namun, ketika dihadapkan pada tekanan Sekutu, Jepang menunjukkan perilaku kolonial yang lebih brutal dibandingkan Belanda. Semua orang dipaksa bergabung dengan Badan Bela Diri Jepang sehingga pelatihan semua orang berakhir. Meski berada di bawah tekanan Jepang, masih ada sekolah yang bisa beroperasi, khususnya pesantren, yang terletak di daerah terpencil yang sulit dijangkau Jepang.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara

komprehensif tentang Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum Zaman Jepang.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Salim. (2007). *Indonesia Belajarlah! Membangun Pendidikan Indonesia*. Tiara Wacana.
- Djohan Makmur. (1993). *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman penjajahan*. Depdikbud.
- Effendy. (2002). *Perjuangan Mencari Ridha Tuhan*. Yayasan Al-Mukhtar-Universitas Sriwijaya.
- Eka Firmansyah, Saiful Anwar, K. (2023). Anthropological Approach to Islamic Education: Establishing Noble Spirituality in Overcoming Social Conflict. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education (AJIE)*, 7(1), 164.
- Eka Firmansyah, Tobroni, dan R. (2023). Anthropology of Islamic Education as A Socio-Cultural-Religious Modernization Strategy in Alam Al-Kudus Islamic Boarding School. *Jurnal Edukasi Islami*, 12(03).
- Eka Firmansyah. (2022). *Islamic Education: dari padang pasir hingga lembah palu*. PT. Faqih Publishing.
- Haidar Putra Daulay. (2009). *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Hasbullah. (2001). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Jalaluddin. (1995). *Kapita Selekta Pendidikan*. Kalam Mulia.
- Leirissa. (1985). *Sejarah Masyarakat Indonesia*. Akademika Pressindo.
- Mahmud Yunus. (1995). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Mutiara Sumber Widya.
- Miftahur Rahman. (2018). Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang. *Jurnal Al-Hikmah Pendidikan Agama Islam*, 02(01).
- Muhammad Rifa'i. (2011). *Sejarah Pendidikan Nasional*. Ar-Ruzz Media.
- Nasution, H. (1992). *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Djambatan.

- Posponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (1993). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Balai Pustaka.
- Saefudin, D. S. (2020). Pengaruh kolonialisme Jepang terhadap pendidikan Islam. *Jurnal Ta'dibuna*, 09(02).
- Setiyadi. (1979a). *Pendidikan di Indonesia dari Zaman ke Zaman*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
- Setiyadi. (1979b). *Pendidikan di Indonesia dari Zaman ke Zaman*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
- Subhan, A. (2012). *Lembaga Pendidikan Islam Abad Ke-20 "Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas"*. Kencana Media Group.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Tilaar. (1995). *Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional*. PT Gramedia.
- Tobroni, E. F. (2022). TIPOLOGI MANAJEMEN TRADISIONAL DAN MODERN DALAM PERKEMBANGAN PENDIDIKAN PESANTREN. *Research and Development Journal Of Education*, 8(1), 334.
- Yunus, M. (1985). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Hadikarya.
- Zuhairini. (1995). *Sejarah Pendidikan Islam*. Bumi Aksara. Bumi Aksara.